

PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK ISLAM SEBAGAI RUMAH ASPIRASI MASYARAKAT (Studi Kasus di DPW PPP Jatim)

Nurul Azizah

Fakultas Dakwah

Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo, Jawa Timur

HP. 0877557 55338, email: messages-noreply@linkedin.com

Abstrak

Tulisan ini mengulas peran dan fungsi dari partai politik Islam; sebagai penyerap aspirasi masyarakat dengan studi kasus di DPW PPP Jatim. Adapun Rumusan masalah secara spesifik adalah; (1) Bagaimanakah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Propinsi Jawa Timur mengimplementasikan Undang-Undang No. 2/2008 tentang Partai Politik dalam mengaktualisasikan fungsinya sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat. (2) Bagaimanakah pola komunikasi politik dalam penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Propinsi Jawa Timur. Perspektif kajiannya adalah sosial politik. Penelitian ini dilakukan di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Jawa Timur. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dan dianalisis menggunakan model fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Implementasi Undang-undang No.02 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah dilakukan secara baik oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Jawa Timur dalam mengaktualisasikan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. (2) Komunikasi politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan sebagai penyalur aspirasi masyarakat sebagian besar telah dilakukan oleh para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur. Tiga fungsi yang tersebut adalah; fungsi legeslatif, fungsi controlling/ pengawasan, dan fungsi budgeting/ anggaran telah dilaksanakan oleh para anggota DPRD Jatim dari Fraksi Persatuan Pembangunan.

Abstract

This paper reviews the role and function of Islamic political parties; as absorbent aspirations of the community with a case study in East Java branch of the PPP. The specific formulation of the problem are; (1) How does the Regional Leadership Council of Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) of East Java implements Act No. 2/2008 on Political Parties in actualizing its function as a means of channeling the aspirations of the community. (2) How does the pattern of political communication in the aspirations of local communities Regional Leadership Council of Partai Persatuan Pembangunan (PPP) of East Java Province. Perspective of the study is socio-political perspective. This research was conducted at Regional Leadership Council of Partai Persatuan Pembangunan of East Java

Province. Data were collected by in-depth interviews and analyzed using phenomenological model. The results showed: (1) Implementation of Act No. 02/2008 on Political Parties has been done either by the Regional Leadership Council of Partai Persatuan Pembangunan of East Java Province in actualizing its function as the voice of the community. Political communication in Regional Leadership Council of Partai Persatuan Pembangunan of East Java Province as the voice of the community has been largely carried out by the representatives in the East Java parliament. Three functions are; legeslatif function, function controlling/supervision, and budgeting functions has been carried out by members of the East Java Parliament of the Partai Persatuan Pembangunan.

Kata Kunci

partai politik Islam, Partai Persatuan Pembangunan, aspirasi masyarakat

Pendahuluan

Komunikasi politik bagi sebuah organisasi partai politik utamanya bagi partai politik baru, karena pada prakteknya komunikasi politik diperlukan bagi kepentingan partai politik itu sendiri. Terutama dalam memperkenalkan profil organisasi, tokoh-tokoh partai yang berpengaruh, visi dan misi partai serta berbagai program-program unggulan partai. Komunikasi politik merupakan salah satu kunci keberhasilan bagi partai dalam perannya sebagai lembaga artikulasi organisasi politik masyarakat, dimana melalui partai inilah masyarakat diharapkan menjadi jembatan dialogis, penyalur aspirasi rakyat, gagasan, serta keinginannya untuk kemudian dituangkan menjadi program partai.

Tidak sebatas itu saja, semua aktifitas organisasi partai politik yang berproses melalui partai tersebut selanjutnya diformulasikan menjadi usulan kebijakan partai yang diperjuangkan kepada pemerintahan

untuk ditindak lanjuti menjadi kebijakan masyarakat (Public Policy). Dengan kata lain semua kepentingan masyarakat disalurkan melalui partai politik.

Oleh karena itu, komunikasi politik yang dilakukan oleh organisasi politik tidak lebih adalah untuk kepentingan untuk mensosialisasikan program-program partai, dimana partai politik dapat mengaktualisasikan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang selanjutnya hendak diperjuangkan menjadi kebijakan pemerintah yang dampaknya bisa dirasakan untuk kepentingan rakyat dan kebutuhan rakyat.

Masalah yang di bahas dalam artikel ini adalah (i) Bagaimanakah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Propinsi Jawa Timur mengimplementasikan Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam mengaktualisasikan fungsinya sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat. (ii) Bagaimanakah pola

komunikasi politik dalam penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Propinsi Jawa Timur.

Tinjauan Pustaka

Menurut Nugraha Riant D¹, secara umum kebijakan public adalah keputusan atau tindakan yang berpengaruh terhadap atau mengarah tindakan individu dalam kelompok masyarakat. Riant membagi kebijakan public ini menjadi dua. Pertama, regulative versus deregulatif; atau restriktif versus non-restriktif, merupakan kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskandari pembatasan-pembatasan.

Kedua, alokatif versus distributive/ redistributif, kebijakan ini berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik. Richard A. Musgrave dan Peggy B menjelaskan bahwa fungsi dari kebijakan public adalah fungsi alokasi yang bertujuan mengalokasikan barang-barang public (*public goods*) dan mekanisme alokasi barang dan jasa yang tidak bisa dilakukan melalui mekanisme pasar, fungsi distributive yang berkenaan dengan pemerataan kesejahteraan termasuk didalamnya perpajakan, fungsi stabilisasi yang berkenaan dengan peran penyeimbang dari kegiatan alokasi dan distribusi tersebut dan fungsi koordinasi anggaran yang berkenaan dengan koordinasi anggaran secara horizontal dan vertical.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh

George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III² ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Pengertian komunikasi politik Gabriel Almond dalam Blake dan Haroldsen adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap system politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan politik memperbandingkan berbagai system politik dengan latar belakang budaya yang berbeda.

Komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikan berperilaku tertentu. Dijelaskan lebih jauh oleh Winddlesham,³ bahwa, sebelum suatu pesan politik dapat dikonstruksikan untuk disampaikan kepada komunikan dengan tujuan mempengaruhinya, disitu harus terdapat keputusan politik yang dirumuskan berdasarkan berbagai pertimbangan.

Salah satu fungsi partai politik sebagaimana tertuang dalam Bab V pasal 7 ayat C UU No. 2 Th 2008 tentang Partai Politik.adalah sebagai sarana penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan

² Edwards III, George C, Implementing Publik Policy. 1980 Congressinal, Quartely press

³ Windelesham, Lord.1972." *What Is Political Communication*", dalam K.J. McGarry (Ed). Mass Communication, Linnet Books & Cive Bingley.

¹ Nugraha, Riant D. 2003. "*Kebijakan Publik*". Elexmedia.Jakarta

Negara. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa partai politik merupakan aktor dominan dalam proses pengambilan kebijakan Negara atau pemerintah.

Bahan dan Cara Kerja

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model eksploratif. Penelitian ini bermaksud mengeksplorasikan tentang fungsi penyalur aspirasi dan peran komunikasi politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Jawa Timur.

Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Menurut Creswell,⁴ Pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut *epoche* (jangka waktu). Konsep *epoche* adalah membedakan wilayah data (*subjek*) dengan interpretasi peneliti. Konsep *epoche* menjadi pusat dimana peneliti menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena untuk mengerti tentang apa yang dikatakan oleh responden.

Meminjam pendapat Anselm Strauss dan Juliet Corbin⁵ peneliti ada

beberapa alasan mengapa peneliti memilih penelitian kualitatif. *Pertama*, sesungguhnya apa yang dimaksud penelitian kualitatif itu adalah peneliti maksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁶ Mengingat studi yang peneliti lakukan di sini adalah menyangkut kepemimpinan yang dikembangkan oleh priyayi/ kyai yang menjadi aktor dalam demokrasi politik lokal. Maka, memilih riset kualitatif bersandar pada kebijaksanaan yang secara informal mengembangkannya dari pengalaman peneliti sendiri.⁷

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 Bulan sejak November 2011 hingga Februari 2012, berlokasi di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Jawa Timur, yang berkantor di Jalan Kendang Sari No. 36 Surabaya.

Subyek Penelitian dalam penelitian ini adalah DPW PPP Propinsi Jawa Timur. Yang beralamat di Jl. Kendang Sari No.36 Surabaya Jawa Timur. tentang bagaimana komunikasi Politik serta peran dan fungsinya sebagai rumah aspirasi masyarakat di Jawa Timur.

Data yang diambil melalui indept Interview (wawancara secara mendalam), data dokumen, hasil observasi dan pengamatan peneliti. Yang menjadi

Sedangkan Juliet Corbin adalah anggota peneliti di juranan Ilmu sosial dan perilaku pada Universitas California, San Francisco.

⁶ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, Terj. Muhammad Sodik dan Imam Muttaqin (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 4

⁷ William Lawrence Neuman, *Social Research Methode: Qualitative and Quantitative approaches*, (London: Allyn & Bacon, 1999), Fourth Edition, hal. 123

⁴ Creswell, J. W. 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publications, IncCalifornia.hal.54.

⁵Anselm Strauss ialah seorang guru besar sosiologi di Jurusan ilmu sosial dan perilaku, pada Universitas California, San Francisco.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah (i) Ketua DPW PPP Jawa Timur, Drs. H.M. Musyaffa' Noer, MSi. MM dan Sekretaris DPW, H. Moh. Hasan Asy'ari, SH, Wakil Ketua DPW, KH. Mujib Imron, Ketua Fraksi PPP DPRD I Jawa Timur Hj. Munjidah Wahab, BA serta beberapa sumber lainnya.

Dalam hal ini peneliti membatasi informan secara purpose sampai memperoleh data dan informan yang bisa di pertanggung jawabkan, komprehensif, tepat dan akurat. (ii) Peristiwa atau situasi yang terjadi atau pernah terjadi yang erat kaitannya dengan penelitian tentang peran komunikasi politik dalam aktualisasi fungsi penyalur aspirasi masyarakat di DPW PPP Jatim.

Informasi yang didapat dari informan akan sangat membantu dalam mengoptimalkan keragaman informasi yang akan di kumpulkan dari para informan. Informasi mengenai sesuatu yang bersifat pribadi sebagaimana latar belakang kehidupan sebelum mereka menjadi kepala daerah atau elit politik, latar belakang keluarganya dan beberapa aktivitas yang tidak tampak dalam keseharian, maka kelompok informan inilah yang akan membantu mendapatkan informasi. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

Tabel.1.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Drs. H.M. Musyaffa' Noer,	Ketua DPW PPP Jawa	S2

	MSi. MM	Timur,	
2.	H. Moh. Hasan Asy'ari, SH	Sekretaris DPW	S1
3.	KH. Mujib Imron	Wakil Ketua DPW,	Aliyah
4.	Hj. Munjidah Wahab, BA	Ketua Fraksi PPP DPRD I Jawa Timur	Sarjana Muda

Sumber: informan yang diwawancarai oleh peneliti sejak November 2011 hingga Februari 2012

Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana dikutip dari Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln,⁸ ada beberapa metode dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam didalam penelitian kualitatif, yaitu; *Pertama*, Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

⁸ Lihat, Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research* (London: Sage Publication, 2000), Edisi ke-9.

Beberapa hal perlu diperhatikan, seorang peneliti saat mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitifitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan nonverbal. Dalam mencari informan, peneliti melakukan dua jenis wawancara, yaitu autoanamnesa (wawancara yang dilakukan dengan subyek atau responden). Beberapa tips saat melakukan wawancara adalah mulai dengan pertanyaan yang mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari pertanyaan yang multiple, jangan menanyakan pertanyaan pribadi selama building rapport, ulang kembali jawaban untuk klarifikasi, kesan positif, dan kontrol emosi negatif.

Kedua, Observasi. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku kegiatan, objek perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik pelaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Ketiga, Dokumen. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial

kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data diserver dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.

Hasil Penelitian

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Perti. PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR.⁹

Hingga saat ini, PPP telah dipimpin oleh 1 Dewan Presidium dan 5 orang ketua, yakni : (1). KH. Idham Chalid (Presiden Partai/NU), Wakil Presiden Partai : Mohamad Syafaat Mintaredja (Parmusi), Thayeb Mohammad Gobel (PSII), Rusli Halil (Perti), Masykur (Kelompok Persatuan Pembangunan/Fraksi di DPR) (1973). (2). H.M.S. Mintaredja (1973-1978). (3). H. Djailani Naro (1978-1989). (4). H. Ismail Hassan Metareum (1989-1998). (5). Hamzah Haz (1998-2007). (6). Suryadharma Ali (2007-2014).¹⁰

PPP sudah mengikuti sebanyak enam kali sejak tahun 1977 sampai pemilu dipercepat tahun 1999 [1] dengan hasil yang fluktuatif, turun naik. Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati diri di atas, maka visi PPP adalah

⁹ Materi Mukhtar VII PPP .2011. 3-7 Juli di Bandung

¹⁰ Sumber dari Sejarah DPP PPP 2012, dan data di olah.

"Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman.

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Jawa Timur¹¹ berkantor di Jl. Kendang Sari No. 36 Surabaya, pada masa bakti 2011 – 2015 di bawah kepemimpinan Drs. H. Musyaffa' Noer, sekretaris H. Hasan Asy'ari, SH dan beberapa pengurus harian lainnya surat keputusan (SK). Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jatim membawahi tiga puluh delapan (38) Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten/ Kota seluruh Jawa Timur.

Prinsip keterwakilan dan kesetaraan antar daerah adalah hal yang penting dalam mengimplementasikan system partai karena berkaitan erat dengan efektivitas dari system pemerintahan. Implementasi dari teknis tersebut di Jawa Timur terbagi menjadi sebelas (XI) daerah pemilihan.

Sejak bergulirnya masa reformasi Partai Persatuan Pembangunan mengalami tren penurunan suara yang sangat signifikan baik secara nasional maupun regional. Kini muncul pertanyaan apakah ini adalah gambaran parpol Islam dengan gaya dan pemikiran yang lama tidak menarik lagi bagi masyarakat.

Periode kebangkitan Partai Persatuan pembangunan yang di muli sejak 1999 belum menampakkan tanda-tanda yang menggembirakan. Ditengah-tengah pergumulan multi parti, dan terpaan fragmentasi politik umat. Partai persatuan Pembangunan meraih 58 kursi di DPRRI atau setara 10,17 % suara. Dengan pekatan "PPP Bangkit" pada pemilu 2009 kembali di uji kesabaran karena kursi di DPR menurun tinggal 38 kursi atau setara 5,33% suara nasional . bahkan di beberapa daerah Partai Persatuan pembangunan tidak bisa mengirimkan wakilnya di DPRD.

Begitu halnya di Jawa Timur, Partai Persatuan Pembangunan mengalami penurunan suara yang sangat drastis. Di buktikan wakil partai yang duduk di DPRD Jatim hanya berjumlah empat orang/ empat kursi, berbeda dengan pemilu legislative 2004 – 2009 PPP Jatim mendapatkan delapan kursi dari sepuluh daerah pemilihan. Jadi suara partai menguap hingga 50 % .

Empat daerah pemilihan yang mendapatkan kursi adalah, daerah pemilihan VIII meliputi kab. Jombang, Mojokerto munjidah Wahab, Dapil II Probolinggo dan Pasuruan Mahdi, Dapil X Pulau Madura Hasan Asy'ari, Dapil III Situbondo, Banyuwangi dan Bondowoso M. Ibrahim Adib.

Agar memperoleh suara yang maksimal di pemilu 2014 DPW PPP Jatim telah mengadakan musyawarah kerja Wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dengan mengundang seluruh pengurus DPW dan Dewan Pimpinan Cabang PPP se- Jatim. Membahas dan merumuskan secara tepat guna, terukur, mencapai sasaran dan mendapatkan hasil yang maksimal perlu di lakukan kegiatan ; pemetaan dan analisis, kelemahan dan kekuatan PPP,

¹¹ Materi Musyawarah Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur. Surabaya.2011, Asrama haji Sukolilo tgl 7 Februari

pemetaan potensi kekuatan-kelemahan competitor, partai-partai lain, segmentasi konstituen, daerah pemilihan, dan pemilihan issue-isue strategis baik nasional maupun regional.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh masing-masing pengurus harian di lingkungan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan partai. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat antara pengurus partai dan anggota legislative sebagai kepanjangan tangan dari partai. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga para anggota fraksi Persatuan Pembangunan mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan Partai. Komunikasi dalam partai politik merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Ada sebagian pengurus bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebar-luaskannya. Seperti yang di jelaskan Hasan Asy'ari,¹²

"Saya di partai sudah dua puluh tahun, jadi mengerti bagaimana antar pengurus saling menjegal hanya untu kepentingan pribadi, tidak jarang hanya untuk mengambil keputusan di lakukan voting, saking kerasnya persaingan.

Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar

implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah pengurus harian dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua pengurus dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan partai dan target yang akan di capai. Jika para pengurus harian pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Seluruh pengurus harian pengambil kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para pimpinan dan pengurus harian DPW PPP Jawa Timur secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan di internal partai.

Resoureces (Sumber Daya) Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika fungsionaris partai yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan)

¹² Hasil Wawancara dengan Hasan Asy'ari Sekretaris PPP Jatim di Kantor Fraksi PPP DPRD Jatim, tgl. 12-3-2012.

berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Sebagaimana dijelaskan oleh ketua PPP Jatim Musyaffa¹³

"Program kerja dari partai persatuan pembangunan yang dihasilkan, target yang akan di capai sebenarnya sudah jelas dan bagus, cuman sekarang masalahnya terletak pada kinerja pengurus dan sumber daya manusia yang di miliki, sehingga tidak jarang apa yang akan di capai menjadi gagal atau tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan.

Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah

dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/ pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor.

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

Dispositions/Attitudes (Disposisi dan Sikap Pelaksana). Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan di Partai Persatuan Pembangunan Propinsi adalah sikap fungsionaris partai atau pengurus. Jika pengurus partai setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon pengurus terhadap kebijakan¹⁴; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program

¹³ hasil wawancara peneliti dengan ketua DPW PPP Jatim di Kantor PPP Jl. Kendang Sari 36 Surabaya, Tgl. 13-3-2012

¹⁴ Mas Roro Lilik Ekowati, Perencanaan. 2005. Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program. Surakarta. Pustaka cakra SOLO

kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Di samping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Situasi ini di benarkan oleh Musyaffa',¹⁵

"Adakalanya memang ada pengurus yang tidak setuju terhadap kebijakan atau keputusan partai, karena suaranya minoritas, maka dia menggagalkan berbagai kekuatan baik secara structural dan cultural. Misalnya membuat surat penolakan terhadap DPP dengan melampirkan beberapa tanda tangan dari pengurus, tokoh masyarakat atau konstituen. Inilah dinamika yang ada di partai, memang terlalu banyak kepentingan.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar

mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi). Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:¹⁶ (i) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; (ii) Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses proses dalam badan pelaksana;(iii) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislative dan eksekutif); (iv)Vitalitas suatu organisasi; (v) Tingkat komunikasi "terbuka", yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi; (vi) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau Pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para pengurus di Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan mengetahui apa

¹⁵ Hasil Wawancara Peneliti dengan Ketua DPW PPP Jatim, pada tgl 13-3-2012. di Surabaya.

¹⁶ Lihat Solichin Abdul Wahab,1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta. Bumi Aksara

yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Seperti pemaparan yang di katakan oleh Munjidah Wahab,

"Percuma saja menerapkan AD/ART baru hasil muktamar kemarin tentang penggemukan pengurus, utusan dari perwakilan daerah atau dapil, kalau orangnya tidak bisa aktif dan bekerja, biarpun sedikit tapi kita bisa kerjasama dan kompak, tidak ada saling menjatuhkan. Kondisi ini sudah berbeda dengan beberapa tahun yang lalu.

Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Aktualisasi Fungsi Komunikasi Politik DPW PPP Jatim Sebagai Sarana Penyalur Aspirasi Masyarakat. Dalam fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Prop. Jatim, dimana Fraksi Persatuan Pembangunan mempunyai fungsi yang sama dengan anggota lainnya. Fungsi tersebut antara lain : fungsi legislas, fungsi pengawasan/ controlling, dan fungsi penganggaran / budgeting.

Mengartikulasikan fungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat tersebut, dalam hal ini peneliti hanya mengambil beberapa bentuk program kerja sebagai saran penjangkaran dan penyalur aspirasi. Peningkatan peran serta partisipasi DPW PPP Prop. Jatim baik secara internal maupun eksternal dengan tujuan

meningkatkan daya tawar Partai Persatuan Pembangunan melalui peran nyata organisasi di tengah-tengah masyarakat. (i) Peningkatan jalinan komunikasi dan koordinasi dengan instansi pemerintah/ lembaga-lembaga lain seperti; Organisasi kemasyarakatan, Organisasi politik, Organisasi kepemudaan, Lembaga Swadaya masyarakat, pondok pesantren dan Muspida Prop. Jawa Timur yang memiliki keterkaitan dengan program dan kebijakan organisasi Partai Persatuan Pembangunan. (ii) Peningkatan jalinan komunikasi dan koordinasi internal organisasi baik secara vertikal maupun horizontal. (iii) Meningkatkan jalinan komunikasi dan kerjasama dengan Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Cabang, dan Dewan Pimpinan Cabang (iv) Mengupayakan jalinan kemitraan dengan instansi terkait dalam program khusus.

Ada beberapa contoh kasus bagaimana Partai Persatuan Pembangunan propinsi Jawa Timur, mendengar, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, misalnya; (i) Kunjungan Anggota DPRD ke Luar Negeri, Sebagaimana pemberitaan media massa terhadap kegiatan dan kinerja anggota legislative yang sudah semakin tidak proporsional, menjadikan hamper seluruh kegiatan dan kunjungan kerja anggota Dewan le luar negeri menjadi sorotan kalangan pers. Pemberitaan yang berlebihan akan semakin membuat terpuruknya citra DPR di masyarakat.

Untuk menghindari timbulnya persepsi masyarakat yang negative terhadap anggota Dewan dan menghindari penilaian konstituen yang negative terhadap fraksi Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur, pimpinan

fraksi dan DPW PPP Jatim, telah mengambil kebijakan yang menetapkan pelarangan bagi anggota Fraksi PPP untuk melakukan kunjungan ke luar negeri.

Apabila terdapat keinginan anggota yang bersangkutan dan atau kebijakan alat kelengkapan Dewan dengan alasan tertentu untuk tetap melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri, kepada anggota fraksi PPP yang bersangkutan dapat mengajukan ijin tertulis kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Jawa Timur. (ii) Mengenai Aliran Ahmadiyah, menurut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan sikap terhadap keberadaan aliran Ahmadiyah, setelah menerima masukan dari berbagai pihak, baik secara structural partai maupun menggali langsung dari masyarakat. Akhirnya FPPP Jatim melalui berbagai kesempatan telah secara tegas menyatakan “Bubarkan Ahmadiyah” karena dinilai telah melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yakni tetap menyebarkan ajaran-ajarannya dan secara prinsip telah melakukan penodaan agama. (iii) Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Hal lain yang tidak kalah penting menjadi isu dan pembahasa di internal Partai Persatuan Pembangunan adalah penyelenggaraan Ibadah Haji yang dalam pelaksanaan tahun 2010 telah mampu menjawab berbagai persoalan yang timbul dan mengalami banyak kemajuan di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Banyak kalangan mengakui adanya kemajuan yang di capai dalam pelaksanaan pelayanan ibadah haji tersebut baik dari segi layanan, transportasi, akomodasi maupun konsumsi. Jumlah jama’ah haji yang

dapat menempati pemondokan di Ring I di Mekkah tak kurang mencapai sekitar 70%, dan pada penyelenggaraan haji tahun 2011 juga telah meningkat menjadi sekitar 85 % .

Pola Komunikasi Politik DPW PPP Jatim Dalam Mengelola Aspirasi Masyarakat Yang Telah Terjaring. Di dalam menjalankan penjaringan aspirasi, DPW PPP Jatim, menggunakan tiga pola komunikasi politik, yaitu Top Dwon Model, Bottom Up Model dan pola Konvergensi (*combination model*). Lebih jelasnya di uraikan sebagai berikut: (i) Pola Top Dwon. Pola komunikasi politik ini dilakukan oleh DPW PPP dengan langsung mengambil policy tanpa harus dikonfirmasi kepada konstituen terlebih dahulu. Artinya DPW PPP melalui rapat harian pengurus melakukan tindakan langsung terkait dengan sebuah policy. Atau bisa dikenal dengan istilah kebijakan / policy dari atas ke bawah. Artinya dri DPW di intruksikan ke DPAC, Ranting dan konstituen partai.

Beberapa kebijakan yang di ambil langsung oleh DPW PPP Jatim adalah terkait dengan penentuan system dan manajemen parti, termasuk juga dalam hal penataan penyaluran fungsi aspirasi masyarakat.

Komunikasi politik yang dilakukan dengan pola top dwon biasanya di gunakan dalam hal-hal yang mendesak dan tidak berkenaan langsung dengan konstituen. Seperti hasil wawancara peneliti dengan sekretaris DPW PPP Jatim Kh. Moh. Hasan Asy’ari, SH sebagai berikut:

“ memang sesekali partai (DPW PPP Jatim) melakukan komunikasi politik secara top dwon, karena memang tidak seluruh keputusan partai harus di konsultasikan

dengan konstituen, ini pun juga terbatas pada hal-hal yang bersifat managerial partai termasuk bagaimana kita menjalin komunikasi politik dengan pemerintah dan lintas partai”¹⁷

Pola top down ini juga dilakukan dalam komunikasi politik yang terkait dengan investasi, dimana dalam hal investasi DPW PPP Jatim telah mengadakan rapat terbatas untuk pengurus harian untuk menentukan rekomendasi apa yang akan disampaikan kepada pemerintah Propinsi Jawa Timur melalui kepanjangan tangan partai di fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Jatim. Seperti yang diungkapkan oleh Musyaffa’ ketua DPW PPP Jatim berikut ini:

“Pola komunikasi politik yang sifatnya top down ini kami terapkan dalam penanganan masalah-masalah yang terkait dengan mandeknya iklim investasi (di Jawa Timur) dimana kami dari DPW melihat, ini harus segera ditangani dan kita tidak perlu menunggu laporan-laporan dari konstituen partai yang ada di bawah. Kita bisa langsung melihat dari Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Gubernur atau data statistik..”¹⁸

(ii) Pola Bottom Up. Seperti pada umumnya sebuah partai, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur juga menjaring aspirasi masyarakat langsung

dari bawah. Dulu istilah ini dikenal dengan “jaring asmara” (jarring aspirasi masyarakat). Pola ini digunakan untuk menentukan policy partai yang sifatnya signifikan. Seperti dalam penjaringan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten/ kota seluruh Jawa Timur.

Pola Bottom Up memang telah dilakukan oleh DPW PPP Jatim, seperti yang telah dituturkan oleh KH. Mujib Imron, ketua Lembaga Pemenangan Pemilu sebagai berikut:

“DPW PPP Jawa Timur dalam menentukan calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah langsung, telah melakukan konvensi, di mana konvensi ini bertujuan untuk menentukan bakal calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh Jawa Timur dari Partai Persatuan Pembangunan. Pemilihan ini dilakukan dengan demokratis, meski keputusannya tidak diambil langsung saat konvensi, melainkan setelah itu ada musyawarah sendiri di masing-masing DPC atau kepengurusan di tingkat kabupaten/ kota.”¹⁹

Pola Konvergensi. Pola komunikasi politik konvergensi ini merupakan pola campuran antara top down dengan bottom up, dimana dengan pola ini DPW PPP Jawa Timur menyerap aspirasi masyarakat dan konstituen. Partai kemudian menindak lanjuti dengan rapat harian terbatas.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Sekretaris DPW PPP Hasan As’ary pada tgl 12 Desember 2011

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa’ Noer di Surabaya pada tgl 14 Desember 2011

¹⁹ Wawancara dengan KH. Mujib Imron, ketua Lembaga Pemenangan Pemilu. Pada tgl 14 Desember 2011

Pola ini sudah dilakukan DPW PPP Jawa Timur terutama terkait dengan penentuan calon anggota legislative di masing-masing daerah pemilihan yang tersebar di sepuluh (10) Dapil di Jawa Timur. Dimana dalam hal ini DPC PPP di tingkat kabupaten memberikan rekomendasi kepada orang-orang untuk memperoleh tempat di setiap daerah pemilihan. Sementara DPW PPP Jatim yang akan menggodok, menetapkan dan memutuskan siapa-siapa yang berhak menempati nomor urut di masing-masing daerah pemilihan (Dapil). Seperti yang dituturkan oleh Musyaffa' ketua DPW PPP Jatim:

"Memang kita menjaring aspirasi langsung dari DPC PPP, dan kemudian kita menentukan orang-orang yang ditempatkan sesuai dengan nomor urut di daerah pemilihan dan itu wewenang penuh DPW untuk menentukan, meski bahan bakunya dari DPC.²⁰

Pola konvergensi ini juga dilakukan oleh DPW PPP Jawa Timur, dalam hal penanganan masalah perijinan di Propinsi Jawa Timur, dimana setelah DPW memperoleh data-data yang mencukupi baru lah DPW PPP mengadakan rapat dan kemudian ditindak lanjuti oleh fraksi PPP, bisa jadi temuan data berasal dari konstituen, bisa juga langsung dari DPW PPP Jawa Timur.

Masing-masing pola komunikasi politik memang mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing. Untuk pola komunikasi politik top down, pola ini memang relative sederhana dan tidak memakan banyak waktu dan biaya.

Keputusannya pun bisa cepat di ambil. Namun kelemahannya kadangkala ada keputusan atau kebijakan yang tidak tepat maka seringkali menimbulkan aksi protes dari DPC PPP atau bahkan konstituen. Karena itu pola top down sangat tepat bila di gunakan untuk persoalan-persoalan managerial partai bukan persoalan yang bersifat eksese atau berdampak besar bagi konstituen. Pola top down ini lebih bagus digunakan untuk menentukan keputusan-keputusan yang sifatnya kurang strategis.

Pola bottom up merupakan sebuah pola komunikasi politik yang sangat ideal bagi partai yang mengedepankan demokrasi seperti Partai Persatuan Pembangunan ini, sehingga keputusan-keputusan partai berasal dari arus bawah dan kondisi riil para konsituen. Memang pola ini membutuhkan *High Cost* (biaya mahal) dan memerlukan waktu yang panjang, namun hasil akhirnya bisa menjadi keputusan yang bisa memuaskan semua pihak, karena keputusan di ambil sesuai dengan aspirasi masyarakat/konstituen. Namun bila komunikasi politik dengan pola bottom up tetapi produk keputusannya tidak memprioritaskan aspirasi bawah, maka konflik akan timbul sebagai aksi kekecewaan. Pola ini memang cukup baik bagi sebuah partai tetapi perlu diingat bahwa suara mayoritas juga belum tentu benar.

Untuk pola konvergensi adalah sebuah pola yang paling rumit karena harus berada pada dua track, yaitu atas dan bawah. Pola ini sangat tepat di gunakan untuk keputusan-keputusan yang sifatnya kompromistis.

Manajemen Komunikasi Politik DPW PPP Jawa Timur dalam Mengelola Aspirasi. Perencanaan Komunikasi Politik DPW PPP Jatim direncanakan oleh

²⁰ Hasi wawancara dengan Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa' Noer di Kantor DPW. Jl. Kendang sari 36 Surabaya pada tgl 14 Desember 2011

pengurus harian DPW PPP, biasanya di kemas dalam acara rapat pengurus harian DPW. Rapat perencanaan ini dibuka oleh Ketua dan di catat di agenda rapat oleh Sekretaris DPW PPP yang kemudian hasil akhir dari keputusan rapat akan di tanda tangani oleh pengurus harian DPW PPP sebagai peserta rapat dalam sebuah berita acara . hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh sekretaris DPW PPP, Hasan:

“Biasanya kita mengadakan rapat-rapat perencanaan kegiatan partai itu sekitar sebulan sekali yang di hadiri oleh seluruh pengurus harian. Termasuk di dalamnya kita membahas aspirasi yang masuk dan bagaimana merencanakan aspirasi tersebut agar bisa di komunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait, tidak jarang kita juga memanggil anggota Dewan di propinsi dan anggota legislative di seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Timur.”²¹

Pengorganisasian Komunikasi Politik, Setelah direncanakan kemudian di tindak lanjuti dengan pengorganisasian dengan terlebih dahulu memerinci detail komunikasi politik yang nanti di harapkan. Kemudian dibuatkan rekomendasi siapa yang akan melakukan komunikasi politik tersebut., bahkan ada juga di bentuk tim yang di SK oleh DPW PPP Jatim, untuk menangani beberapa persoalan yang harus di tangani lebih extra.

Penjelasan ini sesuai dengan apa yang telah di paparkan oleh Musyaffa’ kepada peneliti bertempat di Kantor

DPW PPP Jatim Jl. Kendang Sari 36 Surabaya :

“perencanaan yang sudah di godog oleh pengurus harian kemudian baru di cari kira-kira siapa yang pantas mengemban amanat untuk menyampaikan komunikasi politik, tidak jarang anggota dewan yang berasal dari komisi yang sesuai dengan permasalahan diintruksikan untuk all out menangani persoalan-persoalan tersebut, juga seperti kegiatan menjelang pemilihan kepala daerah maka di bentuklah tim khusus pilkada. Maka pengurus yang terpilih menjadi tim adalah orang-orang yang kompeten di bidang itu, sehingga di harapkan bisa menyelesaikan persoalan dan calon yang di usung Partai Persatuan Pembangunan menjadi pemenang”.²²

Pelaksanaan Komunikasi Politik merupakan Implementasi atau pelaksanaan dari pengorganisasian politik bisa langsung di tangani oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang ada di DPRD Jatim, dimana biasanya FPPP mengadakan rapat terkait dengan isu dan intruksi yang di berikan oleh DPW PPP Jatim, seperti pemaparan dari Munjidah Wahab ketua FPPP Jatim :

“ intruksi yang berasal dari DPW PPP selalu kita follow up di tingkat FPPP dan kita langsung mengeksekusi intruksi tersebut, bisa kita lakukan dengan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah dan penyelewengan yang berbau KKN, bisa juga

²¹ Hasil wawancara dengan Sekretaris DPW PPP Hasan As’ary pada tgl 12 Desember 2011. Di Gedung Indra Pura Ruang FPPP Jawa Timur.

²² Hasil wawancara dengan Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa’ Noer di Kantor DPW. Jl. Kendang sari 36 Surabaya pada tgl 14 Desember 2011.

dengan kita melakukan loby dengan pemerintah, karena memang DPRD itu lembaga politik dimana seringkali penyelesaian-penyelesaiannya juga secara politik'.²³

Monitoring dan Evaluasi Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur juga melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan intruksi dan saluran aspirasi masyarakat yang sudah diberikan pada Fraksi Persatuan Pembangunan Jatim. Apakah aspirasi-aspirasi dan intruksi sudah di tindak lanjuti dan di kerjakan oleh anggota FPPP DPRD Jatim atau belum. Dan sejauh manakah keberhasilan FPPP dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Hal ini di lakukan dengan mengundang langsung FPPP dalam rapat pengurus harian DPW PPP Jatim. Seperti yang diungkapkan oleh Hasan selaku sekretaris DPW:

"DPW sering memanggil anggota FPPP DPRD Jatim terkait dengan aspirasi dan intruksi DPW, apakah sudah di tindak lanjuti apa belum, termasuk juga apakah kendala-kendalanya, kemudian kita juga menanyakan bagaimana tingkat keberhasilannya, bila belum berhasil kita susun lagi perencanaan dan scenario yang lain".²⁴

DPW PPP Jawa Timur sudah mempunyai manajemen komunikasi

politik yang cukup baik, mulai dari perencanaan program kerja, pengorganisasian, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi dari komunikasi- komunikasi politik yang dilakukannya.

Ditingkat perencanaan, komunikasi politik berasal dari aspirasi masyarakat dan juga rencana DPW PPP Jatim harus melihat komposisi pengurus harian sebagai tim perencana, dan apabila ada beberapa pengurus tidak dilibatkan dalam hal perencanaan, maka ini merupakan alasan terjadi ketidak utuhan partai serta solidaritas yang rendah dari pengurus yang teralienasi.

Sementara itu level pengorganisasian, DPW PPP Jawa Timur sudah melakukan langkah-langkah yang cukup taktis, namun lebih sempurna apabila DPW PPP Jatim melibatkan pakar-pakar dan Tim yang berkompeten di bidang ilmu politik, sehingga bisa memberikan arahan dalam pengorganisasian, penyaluran aspirasi masyarakat atau konstituen partai.

Monitoring dan evaluasi komunikasi politik menurut peneliti belum di lakukan dengan baik oleh DPW PPP Jatim, karena beberapa kasus yang belum terselesaikan oleh FPPP juga masih belum ada tindak lanjut dari DPW PPP dan mekanisme pertanggung jawaban penyaluran aspirasi politik belum ada.

Menurut peneliti akan lebih baik bila manajemen komunikasi politik yang ada di DPW PPP Jawa Timur menggunakan buku pedoman politik sebagai acuan pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam berorganisasi partai khususnya Partai Persatuan Pembangunan, yang kemudian buku ini bisa di sebar luaskan keseluruh kader partai di Jawa Timur.. apabila langkah ini ditempuh oleh DPW PPP Jatim maka konstituen di

²³ Hasil wawancara dengan Ketua FPPP Jatim HJ. Munjidah Wahab, BA di DPRD Jatim Surabaya. Tgl 12 Desember 2011.

²⁴ Hasil wawancara dengan Sekretaris DPW PPP Hasan As'ary pada tgl 12 Desember 2011. Di Gedung Indra Pura Ruang FPPP Jawa Timur

grass root tidak akan menemukan kesulitan untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

Kemudian langkah berikutnya pemberian Reward bagi pengurus partai yang berhasil mensosialisasikan program kerja partai, dan punishment bagi pengurus yang tidak aktif dalam kegiatan berpartai. Sehingga bisa dilihat mana kesuksesan dan mana kekurangan atau kegagalan komunikasi politik.

Daftar Pustaka

- Affan Gaffar 2005." *Otonomi Daerah*", Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Anies Baswedan, 2007. "Kata Pengantar" dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: YOI-KITLV.
- Gabriel Almond. 1965. "A Developmental Approach to Political System". Dalam Louis J. Cantori (ed). 1997. *Comparative Political System*. Boston: Holbrook Press
- Anong Uchana Efendi. 1986. *Dinamika Komunikasi: Ramadja Karya*. Bandung.
- Arief priyadi. 2006. "Amnesia Politik Partai Politik". Analisis CSIS, Vol. 35, No.1 .
- Arbi Sanit. 2002. "Demokrasi, Kekuatan Masyarakat, dan Strategi Alternatif". Dalam Maruto MD dan Anwari MWK. *Reformasi Politik dan kekuatan Masyarakat*. Jakarta: LP3ES. Hal.130
- Blake, Reed H, & Haroldsen, Edwin O. 2005. *Taksonomi Konsep Komunikasi*. Surabaya; Papyrus.
- Budi Winarno. 2008. "Sistem Politik Indonesia": Era Reformasi. Yogyakarta. MedPress.
- Dawn Oliver, 2003. *Constitutional Reform in the UK*, Oxford University Press.
- Daman Rozikin. 2001. "Membidik NU Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah". Yogyakarta: Gama Media
- George C. Edwards III. 1980. *Implementing Publik Policy*. Congressional, Quarterly press.
- Hardiman, F. Budi. 2005. "Ruang Publik Politis": komunikasi politis dalam masyarakat Majemuk. Makalah dalam seminar politik lokal di Percik.
- Huntington, Samuel. 2003. "Tertib Politik Pada Masyarakat Yang Sedang Berubah". Edisi Terjemahan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, 2007. "Politik Lokal di Indonesia". Jakarta: Obor dan KITLV.
- Kacung Marijan, 2006. "Demokratisasi di Tingkat Lokal", Surabaya: Pustaka Eureka
- Karl W. Deutsch. *The Nerver of Government*, Glencoe. III. The free Press. 1963 in SP. Varma
- M. Irfan Islamy, 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mas Roro Lilik Ekowati, Perencanaan. 2005. *Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta. Pustaka cakra SOLO
- Moekijat. 1995. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju
- Mustopadidjaja AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publi: formulasi, implementasi dan evaluasi kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Miriam Budiarto. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Monica and Jean Charlot, 1985. 'Les Groupes Politiques dans leur Environnement' in J. Leca and M.

- Grawitz (eds.), *Traite de Science Politique*, iii Paris.
- Nugraha, Riant D. 2003. *"Kebijakan Publik"*. Elexmedia.Jakarta
- Priyatmoko, 2005. *"Restrukturisasi dan Pelembagaan Organisasi pemerintah Kabupaten/Kota,"* dalam M. Asfar (ed.) *Penyiapan Stakeholder Lokal Pelaksana Otonomi Daerah*, Surabaya: CPPS dan Pusdeham.
- Priyatmoko, *"Perubahan Perilaku Birokrasi dalam Pelayanan Publik,"* dalam M. Asfar (ed.) *Penyiapan Stakeholder Lokal Pelaksana Otonomi Daerah*, (Surabaya: CPPS dan Pusdeham, tth).
- Robert Michels, 1984. *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Soenarko. 2000. *Public Policy; pengertian pokok untuk memahami dan analisa kebijaksanaan pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Solichin Abdul Wahab, 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara
- Sutopo dan Sugiyanto. 2001. *Analisis Kebijakan Publik (Bahan ajar Diklatpim tingkat III)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Surapto, Bibit. 2002. *"Analisis Hasil PKB Kabupaten Malang Dalam Pemilu 1999 Dan Strategi Menghadapi Pemilu 2004"*. Program Master of Science in Management Notorthern California Global University.
- Windelesham, Lord. 1972. *"What Is Political Communication"*, dalam K.J. McGarry (Ed). Mass Communication, Linnet Books & Cive Bingley.
- William Dunn, N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan; dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (edisi kedua)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yves Meny and Andrew Knapp, 1998. *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, third edition, Oxford University Press.
- Zarkasih Nur. 2000. *Evaluasi pemilu 1999*. Makalah tidak diterbitkan.

